

TIPOLOGI PENGAWASAN INTERNAL APARATUR DESA PADA PEMERINTAHAN DESA LAMBARA

Stevania Dobe^{1*}, Irma Suriyani²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

30-11-2025

Disetujui:

05-05-2026

Dipublikasi:

02-08-2026

Kata Kunci:

*Pengawasan Internal;
Aparatur Desa; Tipologi
Pengawasan; Pemerintahan
Desa*

ABSTRAK

Penelitian mengenai pengawasan internal pada pemerintahan desa umumnya masih berfokus pada efektivitas pengawasan, akuntabilitas, atau pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi. Pendekatan tersebut belum banyak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan internal berkembang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tipologi pengawasan internal aparatur desa pada Pemerintahan Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparatur desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses open coding digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik pengawasan yang muncul dari data lapangan, kemudian dikelompokkan secara induktif hingga membentuk tipologi pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal aparatur desa di Pemerintahan Desa Lambara membentuk lima tipologi, yaitu pengawasan preventif, administratif, operasional, komunikatif, dan korektif. Kelima tipologi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak berlangsung melalui satu mekanisme tunggal, melainkan membentuk suatu sistem pengendalian yang berlangsung sejak tahap pemberian arahan, pelaksanaan tugas, koordinasi, hingga tindakan perbaikan terhadap pelanggaran aparatur desa. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris berupa tipologi pengawasan internal aparatur desa yang dapat menjadi perspektif awal dalam memahami praktik pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi fundamental dalam administrasi publik karena berperan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip akuntabilitas publik. Dalam perspektif manajemen, pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas menemukan penyimpangan, tetapi juga sebagai proses pengendalian yang memungkinkan organisasi melakukan tindakan korektif dan perbaikan secara berkelanjutan (Siagian, 2014; Terry, 1977). Oleh karena itu,

pengawasan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, khususnya pada organisasi sektor publik.

Urgensi pengawasan semakin meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan penguatan otonomi desa, pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pengelola pembangunan, pelayanan publik, dan keuangan desa. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengawasan internal yang mampu menjaga konsistensi pelaksanaan tugas aparatur desa, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui penguatan lingkungan pengendalian, komunikasi, serta proses pemantauan organisasi (Winarna et al., 2021). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa praktik pengendalian internal pada pemerintahan desa dibangun melalui keterpaduan lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, komunikasi, manajemen risiko, dan pemantauan sebagai bagian dari sistem pengendalian organisasi (Ilona et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, pengawasan internal dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Gazali et al. (2024) menjelaskan bahwa fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Andini et al. (2026) menemukan bahwa sistem pengendalian internal yang didukung prinsip *good government governance* berkontribusi terhadap pencegahan penyimpangan dalam organisasi sektor publik. Selanjutnya, Almishri (2026) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, Sumare et al. (2026) menegaskan bahwa penguatan sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih memandang pengawasan internal sebagai variabel yang memengaruhi akuntabilitas, transparansi, efektivitas pengelolaan keuangan, maupun kinerja organisasi. Misalnya, Ilona et al. (2022) mengembangkan dimensi sistem pengendalian internal pada pemerintahan desa berdasarkan kerangka COSO, sedangkan Winarna et al. (2021) menekankan hubungan antara sistem pengendalian internal dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penurunan tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Uskara et al., 2022). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menempatkan pengawasan sebagai faktor yang memengaruhi suatu variabel tertentu, sehingga belum banyak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan internal berkembang dalam praktik pemerintahan desa sehari-hari.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memandang pengawasan internal bukan sebagai variabel yang diukur tingkat efektivitasnya, melainkan sebagai praktik organisasi yang dikonstruksi melalui interaksi antaraparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis induktif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tipologi pengawasan internal yang terbentuk dalam praktik pemerintahan Desa Lambara. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai mekanisme pengawasan internal pada pemerintahan desa sekaligus memberikan kontribusi empiris berupa tipologi pengawasan yang berkembang dalam praktik administrasi pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi pengawasan internal aparatur desa pada Pemerintahan Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengidentifikasi tipologi pengawasan internal aparatur desa yang terbentuk dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks nyata sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengawasan internal aparatur desa (Yin, 2018). Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparatur desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pengawasan internal (Patton, 2015). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas aparatur desa (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dilakukan secara interaktif mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Pada tahap kondensasi data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan open coding untuk mengidentifikasi berbagai praktik pengawasan yang muncul dari data lapangan (Saldaña, 2021). Kode-kode yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan ke dalam kategori melalui proses kategorisasi hingga membentuk tipologi pengawasan internal aparatur desa (Miles et al., 2014; Saldaña, 2021). Tipologi dalam penelitian ini dibangun secara induktif melalui proses pengodean dan pengelompokan tema-tema yang muncul dari data lapangan sehingga merupakan temuan empiris penelitian, bukan kategori yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan teori. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparatur desa, dan BPD, serta triangulasi teknik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan internal aparatur di Pemerintahan Desa Lambara tidak dilaksanakan melalui satu mekanisme tunggal, melainkan melalui berbagai bentuk pengawasan yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan tugas aparatur desa. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, praktik pengawasan internal tersebut membentuk lima tipologi, yaitu pengawasan preventif, pengawasan administratif, pengawasan operasional, pengawasan komunikatif, dan pengawasan korektif.

1. Pengawasan Preventif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan sejak sebelum pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian tujuan kebijakan, pemberian arahan, dan pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing aparatur desa. Kepala desa secara rutin memberikan arahan mengenai tanggung jawab aparatur serta target yang harus dicapai sehingga setiap aparatur memahami tugas dan kewajibannya. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa:

"Sebelum pekerjaan dimulai kami selalu memberikan arahan kepada perangkat desa, membagi tugas sesuai bidang masing-masing, supaya mereka tahu apa yang harus dikerjakan."

Selain melalui arahan langsung, musyawarah desa juga dimanfaatkan sebagai forum untuk menyampaikan kebijakan, menyamakan persepsi, serta mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pekerjaan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses

pengawasan telah dimulai sejak tahap perencanaan melalui pemberian arahan dan pembagian tanggung jawab kepada setiap aparat desa.

2. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif dilakukan melalui penerapan mekanisme administrasi yang berlaku di kantor desa. Bentuk pengawasan ini diwujudkan melalui pencatatan kehadiran aparat, pembagian tugas secara administratif, serta pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Salah seorang aparat desa menjelaskan:

"Kalau ada yang tidak hadir atau terlambat, langsung terlihat dari absensi sehingga bisa diketahui siapa yang belum menjalankan tugas."

Hasil observasi menunjukkan bahwa absensi menjadi instrumen utama dalam memantau kedisiplinan aparat desa. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah desa dapat mengidentifikasi tingkat kehadiran aparat sekaligus mengevaluasi kepatuhan terhadap jam kerja yang telah ditetapkan. Meskipun mekanisme administrasi telah diterapkan secara rutin, penelitian masih menemukan adanya aparat desa yang belum konsisten dalam memenuhi ketentuan kehadiran.

3. Pengawasan Operasional

Pengawasan operasional dilakukan secara langsung selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretaris desa memiliki peran penting dalam memantau aktivitas aparat sehari-hari, memastikan pekerjaan berjalan sesuai pembagian tugas, serta melakukan koordinasi apabila ditemukan kendala di lapangan. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa:

"Setiap hari kami memantau pekerjaan perangkat desa. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai atau ada kendala, kami langsung koordinasikan supaya segera ditindaklanjuti."

Pemantauan tersebut dilakukan melalui komunikasi langsung maupun pengecekan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing aparat. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan pada akhir pekerjaan, tetapi berlangsung secara terus-menerus selama proses pelayanan pemerintahan desa.

4. Pengawasan Komunikatif

Penelitian juga menemukan bahwa komunikasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan internal. Selain koordinasi secara langsung, pemerintah desa memanfaatkan alat komunikasi berupa handy talky (HT) untuk mempercepat penyampaian informasi kepada aparat ketika melaksanakan tugas. Salah seorang informan menyampaikan:

"Kalau ada informasi mendadak atau pekerjaan di lapangan, biasanya kami menggunakan HT supaya perangkat cepat mengetahui dan segera menindaklanjuti."

Selain penggunaan HT, komunikasi juga berlangsung melalui koordinasi rutin antara kepala desa, sekretaris desa, dan aparat desa, baik dalam kegiatan musyawarah maupun komunikasi sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan aparat desa.

5. Pengawasan Korektif

Pengawasan korektif dilakukan ketika ditemukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memberikan teguran kepada aparat yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, terutama berkaitan dengan kedisiplinan dan kehadiran. Kepala Desa menjelaskan:

"Kalau ada perangkat yang melanggar aturan atau sering tidak hadir, kami beri teguran terlebih dahulu. Kalau masih berulang, kami bahas bersama dalam musyawarah."

Selain pemberian teguran, penyelesaian berbagai permasalahan kedisiplinan juga dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, serta Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Mekanisme tersebut bertujuan untuk memperbaiki perilaku aparatur sekaligus menjaga pelaksanaan tugas tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal aparatur pada Pemerintahan Desa Lambara dilaksanakan melalui lima tipologi yang saling melengkapi, yaitu pengawasan preventif, administratif, operasional, komunikatif, dan korektif. Kelima tipologi tersebut membentuk mekanisme pengawasan yang diterapkan sejak tahap perencanaan, selama pelaksanaan pekerjaan, hingga penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi. Meskipun berbagai bentuk pengawasan telah dijalankan, penelitian masih menemukan adanya pelanggaran kedisiplinan, terutama berkaitan dengan kehadiran dan konsistensi sebagian aparatur desa dalam menjalankan tugas.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengawasan internal aparatur pada Pemerintahan Desa Lambara tidak dilaksanakan melalui satu mekanisme tunggal, melainkan melalui lima tipologi pengawasan yang saling melengkapi, yaitu pengawasan preventif, administratif, operasional, komunikatif, dan korektif. Kelima tipologi tersebut membentuk suatu sistem pengawasan yang berlangsung sejak tahap pemberian arahan, pelaksanaan pekerjaan, hingga penanganan terhadap pelanggaran aparatur desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan internal dalam pemerintahan desa tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan hasil kerja, tetapi juga menjadi bagian dari keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung secara berkesinambungan. Terry (1977) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Senada dengan itu, Siagian (2014) menegaskan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui proses pengendalian yang dilakukan secara sistematis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan preventif diwujudkan melalui pemberian arahan, penjelasan tujuan, dan pembagian tugas sebelum pekerjaan dilaksanakan. Tahapan ini menunjukkan bahwa pengawasan telah dimulai sejak proses perencanaan sehingga aparatur memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, pengawasan administratif dilakukan melalui absensi, pembagian tugas, dan pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengawasan operasional dijalankan melalui pemantauan langsung terhadap aktivitas aparatur desa oleh Sekretaris Desa selama proses pelayanan berlangsung. Pada saat yang sama, pengawasan komunikatif diwujudkan melalui koordinasi rutin, musyawarah, serta pemanfaatan handy talky (HT) sebagai media komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas. Ketika ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, pengawasan korektif diterapkan melalui pemberian teguran dan penyelesaian permasalahan secara musyawarah. Rangkaian mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal di Desa Lambara berlangsung secara bertahap dan saling melengkapi, bukan sebagai aktivitas yang berdiri sendiri.

Temuan tersebut memperluas pemahaman mengenai praktik pengawasan internal pada pemerintahan desa. Selama ini pengawasan sering dipahami sebagai aktivitas evaluasi yang dilakukan setelah pekerjaan selesai. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan berlangsung secara berkelanjutan mulai dari tahap pemberian arahan, pelaksanaan pekerjaan, koordinasi, hingga tindakan korektif ketika terjadi penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan dan pengendalian yang menjaga agar seluruh aktivitas aparatur tetap berada pada jalur pencapaian tujuan organisasi. Pandangan ini sejalan dengan Robbins & Judge (2019) yang menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh keterpaduan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan bersama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Sekretaris Desa memiliki peran yang dominan dalam pelaksanaan pengawasan operasional. Berbeda dengan Kepala Desa yang lebih berperan dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan strategis, Sekretaris Desa menjalankan fungsi pengawasan sehari-hari melalui pemantauan pelaksanaan tugas, koordinasi pekerjaan, serta penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi aparatur desa. Temuan ini menunjukkan adanya pembagian fungsi pengawasan sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan desa. Menurut Siagian (2014), pembagian kewenangan yang jelas memungkinkan fungsi pengawasan berjalan secara efektif karena setiap unsur organisasi memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam konteks penelitian ini, pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak hanya bertumpu pada Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi, tetapi juga didukung oleh fungsi koordinatif yang dijalankan oleh Sekretaris Desa.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar penyampaian informasi. Penggunaan HT, koordinasi rutin, dan musyawarah menjadi media yang memungkinkan pimpinan memantau perkembangan pekerjaan sekaligus memberikan arahan secara cepat kepada aparatur desa. Robbins & Judge (2019) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan mekanisme penting dalam menyelaraskan aktivitas individu dengan tujuan organisasi. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa komunikasi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan karena memungkinkan proses pemantauan, koordinasi, dan penyelesaian masalah dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu laporan formal. Dengan demikian, komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan internal di Pemerintahan Desa Lambara.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa berbagai bentuk pengawasan yang telah diterapkan belum sepenuhnya mampu menghilangkan pelanggaran disiplin aparatur desa, terutama berkaitan dengan kehadiran dan konsistensi dalam menjalankan tugas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pengawasan belum secara otomatis menghasilkan tingkat kepatuhan yang optimal. Terry (1977) menyatakan bahwa fungsi pengawasan tidak berhenti pada identifikasi penyimpangan, tetapi harus diikuti dengan tindakan perbaikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Oleh karena itu, tantangan utama pengawasan internal di Desa Lambara bukan terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan, melainkan pada konsistensi pelaksanaan setiap bentuk pengawasan dalam mendorong disiplin dan tanggung jawab aparatur desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan internal pada Pemerintahan Desa Lambara membentuk suatu tipologi yang terdiri atas pengawasan preventif, administratif, operasional, komunikatif, dan korektif. Tipologi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan internal di tingkat pemerintahan desa merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai mekanisme pengendalian sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Temuan ini memberikan perspektif bahwa pengawasan internal pada pemerintahan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian organisasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendukung terciptanya disiplin kerja, koordinasi antaraparat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih tertib.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tipologi pengawasan internal aparatur desa pada Pemerintahan Desa Lambara yang terbentuk secara empiris melalui praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil analisis, pengawasan internal tidak berlangsung melalui satu mekanisme tunggal, tetapi membentuk lima tipologi yang saling melengkapi, yaitu pengawasan preventif, administratif, operasional, komunikatif, dan korektif. Kelima tipologi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal telah diterapkan sejak tahap pemberian arahan, pelaksanaan tugas, koordinasi, hingga tindakan perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan internal di tingkat pemerintahan desa merupakan suatu sistem pengendalian yang berlangsung secara berkesinambungan dalam mendukung kedisiplinan aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menawarkan tipologi pengawasan internal aparatur desa yang dibangun secara induktif berdasarkan praktik pemerintahan di Desa Lambara. Tipologi tersebut dapat menjadi perspektif awal dalam memahami variasi mekanisme pengawasan internal pada pemerintahan desa, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk menguji penerapannya pada konteks desa yang berbeda. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya menjaga konsistensi penerapan setiap bentuk pengawasan agar pelaksanaan tugas aparatur desa berlangsung lebih disiplin, terkoordinasi, dan akuntabel.

REFERENSI

- Almishri, A. (2026). The effect of internal control systems, village government competence, financial report transparency, and financial report accessibility on the accountability of village funds in the Pangkah Subdistrict. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 7(4), 1361–1376. <https://doi.org/10.59141/jiss.v7i4.2289>
- Andini, S., Anto, L., & Mirosea, N. (2026). The effect of internal control and good government governance on fraud prevention. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 9(1), 8962–8976. <https://doi.org/10.31538/ijse.v9i1.9898>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Gazali, M., Hisanuddin, L. O. I., & Rasmuin. (2024). Fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2). <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9573>
- Iloni, D., Zaitul, Z., & Novianti, N. (2022). Internal control in village government: The case of Indonesia's village government. *Administrație și Management Public*, 38, 162–179. <https://doi.org/10.24818/amp/2022.38-10>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat administrasi*. Bumi Aksara.
- Sumare, C., Tinangon, J. J., & Kindangen, W. D. (2026). Evaluasi sistem pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Studi kasus di Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 4(1), 22–31. <https://doi.org/10.58784/rapi.445>
- Terry, G. R. (1977). *Principles of management* (7th ed.). Richard D. Irwin.
- Uskara, A. M., Sudrajat, Akbar, B., & Mulyani, S. (2022). The effect of internal control system's effectiveness on village government's performance. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 35(89), 195-214.
- Winarna, J., Muhtar, M., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2021). Government internal control system and local government administration performance: Evidence from Indonesian local governments. *Public Finance Quarterly*, 66(Special Issue), 88–107. https://doi.org/10.35551/PFQ_2021_s_2_5
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.